JIS: JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 3, Bulan November-Desember: hlm. 1323-1332
e-ISSN: 2963-2072 | email: jurnalq17@gmail.com | Lisensi: CC-BY

URL: https://yptb.org/index.php/jis DOI: https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3188

MODEL EKOSISTEM KEUANGAN ISLAM BERBASIS RANTAI NILAI UNTUK PENGUATAN UMKM DI KOTA TANGERANG

Wahyu Hidayat[1*], & Muhammad Azka[2]
[1&2]Fakultas Syariah, Institut Asy-Syukriyyah
e-mail : wahyu.hidayat@asy-syukriyyah.ac.id; mazka5634@gmail.com

Submit Tgl: 09-November-2026 Diterima Tgl: 15-November-2026 Diterbitkan Tgl: 16-November-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengembangkan model ekosistem keuangan Islam berbasis rantai nilai yang sesuai dengan karakteristik UMKM di Kota Tangerang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sintesis literatur dan pemetaan konseptual terhadap keterkaitan pembiayaan Islam, halal value chain, digitalisasi, penguatan kapasitas, kelembagaan, dan market linkage. Analisis dilakukan melalui proses kondensasi informasi, kategorisasi tema, pemetaan hubungan antarkomponen, serta sintesis model. Hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi pembiayaan yang berdiri sendiri berpotensi menghasilkan dampak yang terbatas apabila tidak diikuti peningkatan kapabilitas internal dan akses terhadap rantai nilai. Berdasarkan sintesis tersebut dikembangkan model *Tangerang Sharia Economic Link* (TSEL) yang terdiri atas enam tahapan, yaitu mapping, *assessment, upgrading, linking, scaling*, dan *impact.* Model mengintegrasikan pemerintah sebagai orkestrator, lembaga keuangan Islam sebagai *financial linkage*, UMKM sebagai aktor pencipta nilai, lembaga halal sebagai penguat *assurance*, dunia usaha sebagai off-taker, perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan, serta komunitas sebagai modal sosial. Kontribusi penelitian terletak pada integrasi ekosistem keuangan Islam dengan halal value chain dan market linkage pada tingkat lokal, dengan Maqasid al-Shariah sebagai kerangka evaluasi dampak.

Kata Kunci: Ekosistem Keuangan Islam; Rantai Nilai; UMKM; Maqasid al-Shariah; Kota Tangerang.

Abstract: *This research aims to develop a value chain-based Islamic financial ecosystem model that is in accordance with the characteristics of MSMEs in Tangerang City. The research uses a descriptive qualitative approach with literature synthesis and conceptual mapping of the relationship between Islamic finance, halal value chain, digitalization, capacity building, institutional, and market linkage. The analysis is carried out through the process of information condensation, thematic categorization, mapping of intercomponent relationships, and model synthesis. The results of the study show that stand-alone financing interventions have the potential to produce limited impacts if not followed by increased internal capabilities and access to the value chain. Based on this synthesis, the Tangerang Sharia Economic Link (TSEL) model was developed which consists of six stages, namely mapping, assessment, upgrading, linking, scaling, and impact. The model integrates the government as an orchestrator, Islamic financial institutions as financial linkage, MSMEs as value creation actors, halal institutions as assurance reinforcements, the business world as an off-taker, universities as knowledge centers, and communities as social capital. The contribution of the research lies in the integration of the Islamic financial ecosystem with halal value chains and market linkage at the local level, with Maqasid al-Shariah as the framework for impact evaluation.*

Keywords: *Islamic Financial Ecosystem; Value Chain; MSMEs; Maqasid al-Shariah; Tangerang City.*

Copyright © 2026: Wahyu Hidayat, & Muhammad Azka

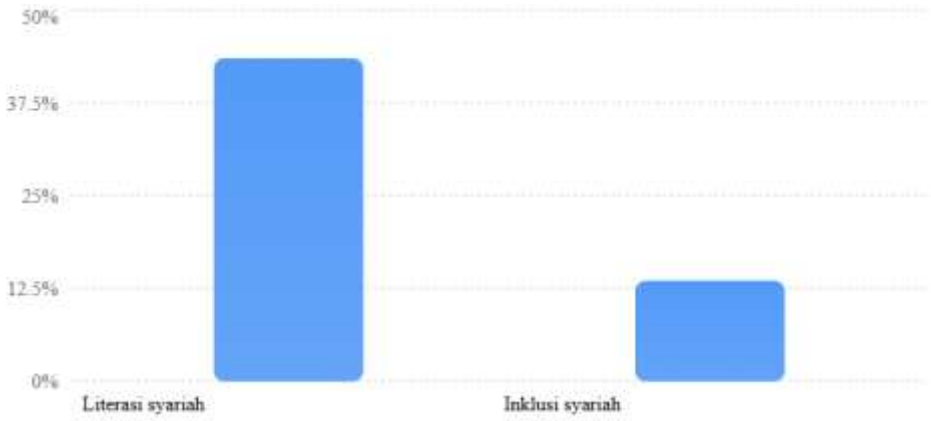
Cara mengutip Hidayat, W., & Azka, M. (2026). Model Ekosistem Keuangan Islam Berbasis Rantai Nilai untuk Penguatan UMKM di Kota Tangerang. *JIS: Journal Islamic Studies*, *4*(3), 1323–1332. https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3188

PENDAHULUAN

UMKM merupakan bagian penting dari struktur ekonomi Indonesia sekaligus instrumen strategis dalam pemerataan kesempatan ekonomi (Menne et al., 2022; Utomo et al., 2021). Namun, persoalan UMKM tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai keterbatasan modal. Persaingan pasar, perubahan perilaku konsumen, tuntutan standardisasi produk, digitalisasi, keterbatasan kemampuan manajerial, dan kebutuhan integrasi dengan rantai pasok membuat penguatan UMKM memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Dalam konteks tersebut, pembiayaan hanya merupakan salah satu elemen dari proses peningkatan kapasitas usaha.

Perspektif ekonomi Islam memberikan kerangka yang lebih luas karena aktivitas ekonomi tidak semata diarahkan pada peningkatan keuntungan, tetapi juga pada keadilan, keberlanjutan, perlindungan harta, peningkatan kualitas manusia, dan kemaslahatan sosial (Menne et al., 2022; Qizam et al., 2025). Dengan demikian, ekosistem keuangan Islam perlu dipahami bukan sekadar sebagai hubungan antara lembaga keuangan dengan penerima pembiayaan, melainkan sebagai jaringan kelembagaan yang menghubungkan sumber pembiayaan, pengetahuan, teknologi, produksi, distribusi, pasar, dan nilai-nilai syariah.

Dalam konteks nasional, urgensi financial linkage terlihat dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK bersama BPS. Hal ini tercermin dalam Grafik 1:

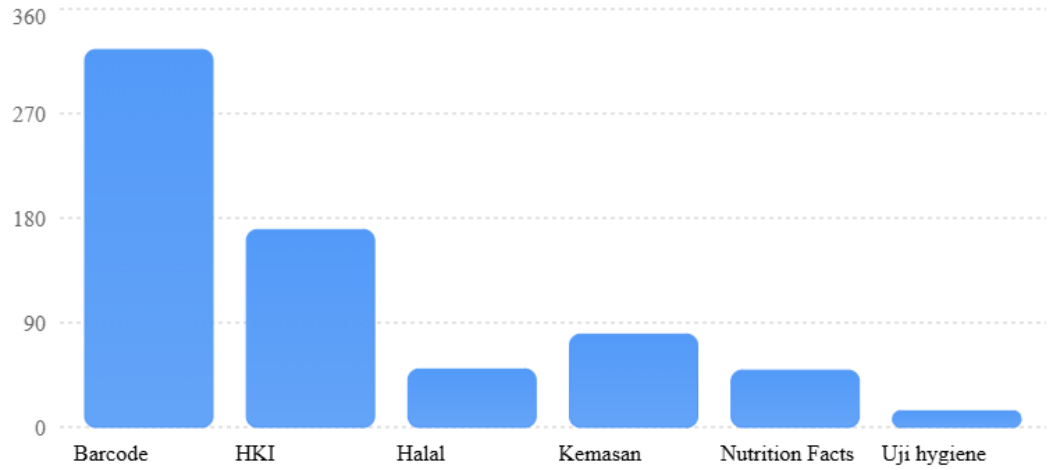


Grafik 1. SNLIK 2025

Indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,42 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,41 persen. Angka tersebut merupakan indikator nasional dan tidak dapat diperlakukan sebagai estimasi khusus Kota Tangerang. Kesenjangan literasi dan inklusi ini tetap relevan sebagai konteks makro untuk menjelaskan perlunya mekanisme yang menghubungkan pemahaman keuangan syariah dengan penggunaan layanan yang sesuai kebutuhan UMKM (OJK & BPS, 2025).

Urgensi pendekatan tersebut juga relevan bagi Kota Tangerang. Data pemerintah daerah menyebutkan bahwa Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM) mencatat sekitar 145.113 pelaku UMKM di Kota Tangerang per Desember 2025.

Copyright © 2026: Wahyu Hidayat, & Muhammad Azka



Grafik 2. Fasilitasi legalitas dan standardisasi UMKM 2025 Kota Tangerang

Pada 2025, pemerintah kota juga memfasilitasi 545 UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan barcode, dengan rincian 50 UMKM untuk fasilitasi halal, 170 UMKM untuk HKI, dan 325 UMKM untuk barcode. Data tersebut menunjukkan besarnya basis usaha dan adanya intervensi legalitas serta standardisasi produk. Namun, data jumlah UMKM dan fasilitasi belum dengan sendirinya membuktikan peningkatan omzet, produktivitas, akses pembiayaan, atau keberhasilan masuk ke rantai pasok. Karena itu, integrasi program dan evaluasi outcome menjadi isu penting dalam pengembangan ekosistem (Pemerintah Kota Tangerang, 2025; Pemerintah Kota Tangerang, 2026; BPS Kota Tangerang, 2026).

Literatur terdahulu mendukung kebutuhan terhadap pendekatan integratif. Utomo et al. (2021) menunjukkan pentingnya keterhubungan sisi permintaan pembiayaan dengan sisi penawaran yang melibatkan lembaga keuangan, pemerintah, institusi sosial, pendidikan, dan dunia usaha. Menne et al. (2022) memperlihatkan bahwa keberlanjutan UMKM berbasis syariah berkaitan dengan sumber daya manusia, produktivitas, diversifikasi, pemasaran, dan teknologi keuangan syariah.

Pada sisi rantai nilai, Ardiantono et al. (2024) mengidentifikasi proses, kemasan, penyimpanan, transportasi, aspek fundamental, kebijakan pendukung, dan teknologi sebagai faktor penting dalam implementasi halal supply chain pada UMKM. Harsanto et al. (2025) menunjukkan perkembangan kajian halal value chain pada irisan halal supply chain, halal logistics, food supply, dan supply chain management. Efendi et al. (2025) menambahkan pentingnya integrasi strategi hijau dengan rantai nilai halal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa halal perlu dipahami sebagai integritas proses, bukan sekadar atribut produk.

Dimensi ekonomi sertifikasi juga semakin memperoleh dukungan empiris. Azizah et al. (2025) menemukan hubungan positif antara sertifikasi halal dan kinerja UMKM di Indonesia. Kristanto dan Kurniawati (2025) menghubungkan sertifikasi dengan ketahanan halal supply chain, keunggulan kompetitif, dan kinerja finansial UMKM makanan beku. Afdawaiza et al. (2025b) menunjukkan pentingnya kapabilitas dan sinergi dukungan kelembagaan bagi usaha halal milik perempuan. Fianto et al. (2026) mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi intensi UMKM di Indonesia dan Malaysia untuk memperoleh sertifikat halal. Literatur ini memperkuat argumen bahwa fasilitasi sertifikasi perlu disertai kesiapan pelaku usaha dan dukungan ekosistem.

Studi yang lebih baru memperlihatkan semakin kuatnya hubungan antara digitalisasi, regulasi, pembiayaan, dan halal value chain. Harsanto et al. (2024) menunjukkan relevansi teknologi digital dalam penguatan halal supply chain, sedangkan Harsanto et al. (2025) memetakan perkembangan literatur halal value chain. Efendi et al. (2025) menghubungkan strategi hijau dengan integrasi ekosistem halal UMKM, sementara Arianty et al. (2025) menekankan perlunya penyelarasan UMKM berbasis syariah dengan lembaga keuangan dan dukungan pemerintah. Bukti empiris yang lebih baru juga mengaitkan integrasi ekosistem keuangan Islam, digitalisasi, dan kinerja halal value chain (Armina & Setiawan, 2026; Isra & Malahayatie, 2026). Dengan demikian, gap penelitian tidak terutama terletak pada ketiadaan studi mengenai masing-masing komponen, melainkan pada keterbatasan model yang menjelaskan bagaimana komponen tersebut diorkestrasi menjadi ekosistem berbasis rantai nilai pada tingkat lokal, khususnya Kota Tangerang.

Penelitian ini mengisi gap tersebut melalui pengembangan Tangerang Sharia Economic Link (TSEL) melalui mekanisme integrasi yang menghubungkan pemetaan UMKM, assessment, peningkatan kapasitas, pembiayaan Islam, halal value chain, digitalisasi, market linkage, kemitraan industri, dan evaluasi berbasis Maqasid al-Shariah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi komponen utama ekosistem keuangan Islam, menganalisis hubungan antarkomponen, dan merumuskan model yang kontekstual bagi penguatan UMKM di Kota Tangerang.

Ekosistem keuangan Islam merupakan jaringan aktor dan institusi yang memungkinkan mobilisasi sumber daya keuangan dan nonkeuangan berdasarkan prinsip syariah (Utomo et al., 2021; Qizam et al., 2025). Dalam konteks UMKM, ekosistem tersebut meliputi bank syariah, BPRS, KSPPS, BMT, fintech syariah, Islamic social finance, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pendamping, dunia usaha, dan komunitas. Akses pembiayaan karenanya tidak ditempatkan sebagai titik akhir, tetapi sebagai financial linkage yang menghubungkan kebutuhan modal dengan peningkatan kemampuan usaha.

Digitalisasi ditempatkan sebagai infrastruktur pendukung, bukan tujuan akhir (Harsanto et al., 2024; Qizam et al., 2025). Fungsi digitalisasi mencakup pencatatan transaksi, pemasaran, marketplace, pembayaran, pengelolaan pelanggan, traceability, dan koordinasi rantai pasok. Prinsip yang digunakan adalah appropriate digitalization, yaitu teknologi dipilih berdasarkan kebutuhan, kesiapan, biaya, dan nilai ekonomi yang dihasilkan.

Resource-Based View menjelaskan bahwa sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak mudah disubstitusi dapat menjadi basis keunggulan kompetitif organisasi (Barney, 1991). Pada UMKM, sumber daya tersebut dapat berupa keterampilan pemilik, reputasi produk, pengetahuan proses, merek, jaringan pemasok, relasi pelanggan, dan kemampuan mengelola informasi. Dalam model TSEL, pembiayaan dan fasilitasi eksternal diarahkan untuk memperkuat sumber daya internal agar dukungan program tidak berhenti sebagai input, tetapi berubah menjadi kapabilitas usaha.

Dynamic capabilities menjelaskan kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengonfigurasi ulang kompetensi internal maupun eksternal dalam merespons perubahan lingkungan (Teece, Pisano, & Shuen, 1997; Teece, 2007). Kerangka sensing, seizing, dan transforming digunakan untuk membaca peluang serta hambatan UMKM, memilih dan memobilisasi dukungan yang sesuai, lalu memperbarui proses bisnis. Pada TSEL, sensing diterapkan dalam Mapping dan Assessment; seizing

dalam Upgrading dan Linking; sedangkan transforming tercermin dalam Scaling dan perbaikan berkelanjutan berbasis Impact.

Stakeholder Theory menekankan bahwa organisasi perlu mengelola hubungan dengan pihak-pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan (Freeman, 1984). Kerangka ini relevan karena penguatan UMKM melibatkan pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga penjamin halal, perguruan tinggi, komunitas, pemasok, pembeli, dan pelaku UMKM. Kejelasan peran, mekanisme koordinasi, pertukaran informasi, dan akuntabilitas diperlukan agar kolaborasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Halal value chain merupakan proses penciptaan nilai yang mempertahankan integritas halal sejak bahan baku sampai konsumen akhir (Harsanto et al., 2025). Konsep value chain menjelaskan rangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai, mulai dari pengadaan input, operasi, distribusi, pemasaran, hingga layanan (Porter, 1985). Dalam konteks keberlanjutan, kinerja usaha perlu dibaca melalui keterkaitan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, bukan hanya pertumbuhan penjualan (Elkington, 1997). Karena itu, TSEL menghubungkan halal value chain dengan peningkatan kapasitas, efisiensi sumber daya, tanggung jawab sosial, serta praktik produksi dan distribusi yang lebih berkelanjutan. Dalam penelitian ini, HVC diposisikan sebagai jembatan antara UMKM dan pasar melalui penguatan bahan baku, proses produksi, assurance, kemasan, logistik, distribusi, branding, dan akses pembeli.

Maqasid al-Shariah digunakan sebagai kerangka evaluasi agar peningkatan daya saing tidak kehilangan orientasi kemaslahatan (Qizam et al., 2025). Hifz al-din diterjemahkan melalui kepatuhan halal dan etika; hifz al-nafs melalui keamanan produk, kesejahteraan, dan pekerjaan layak; hifz al-'aql melalui pendidikan dan kompetensi; hifz al-nasl melalui ketahanan keluarga dan keberlanjutan; dan hifz al-mal melalui pertumbuhan aset, pendapatan, akses pembiayaan, serta perlindungan kekayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi pengembangan model. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi komponen, hubungan, mekanisme, dan konfigurasi ekosistem yang relevan bagi penguatan UMKM berbasis rantai nilai. Data konseptual diperoleh melalui sintesis literatur mengenai Islamic financial ecosystem, Islamic finance, UMKM, halal value chain, halal supply chain, digitalization, halal certification, financial inclusion, dan Maqasid al-Shariah. Data kontekstual Kota Tangerang berasal dari sumber resmi pemerintah dan Badan Pusat Statistik. Konteks kebijakan jaminan produk halal juga dibaca dengan memperhatikan PP Nomor 42 Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui PP Nomor 40 Tahun 2026. Ketentuan teknis dan masa penahapan harus diperiksa menurut kategori produk dan skala usaha, sehingga artikel tidak menggeneralisasi satu tenggat untuk seluruh jenis produk (Republik Indonesia, 2024, 2026).

Analisis dilakukan melalui empat tahap: identifikasi tema, kondensasi informasi, pemetaan hubungan antarkomponen, dan sintesis model. Literatur dikelompokkan berdasarkan pembiayaan, kapasitas, halal, digitalisasi, pasar, kelembagaan, dan dampak. Selanjutnya, hubungan antarkomponen dipetakan untuk membentuk mekanisme intervensi yang logis.

Digitalisasi digunakan untuk memperkuat hubungan marketplace, digital payment, pencatatan transaksi, customer management, dan traceability. Teknologi harus dipilih berdasarkan manfaat ekonomi dan kesiapan UMKM sehingga prinsip value first lebih

diutamakan daripada technology first. Kajian sistematis menempatkan teknologi digital sebagai enabler penting dalam integrasi halal supply chain, sementara studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa dampaknya perlu dibaca bersama pembiayaan, regulasi, dan kesiapan rantai nilai (Harsanto et al., 2024; Harsanto et al., 2025; Armina & Setiawan, 2026; Isra & Malahayatie, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Financial Access menuju Financial Linkage

Sintesis menunjukkan bahwa pembiayaan akan lebih produktif apabila diberikan setelah assessment mengenai kebutuhan modal, kemampuan pengelolaan, kapasitas produksi, kelayakan usaha, dan potensi pasar. Mekanisme yang ditawarkan adalah diawali melalui Assessment, kemudian di support pembiayaan melalui Islamic Financing. Setelah itu dilakukan Mentoring untuk mendampingi pelaku usaha agar on the track, berdampak pada Capacity Improvement di perkuat juga dengan Market Linkage sehingga produk terdistribusi secara masiv menghasilkan Sustainability. Pendekatan ini mengubah pembiayaan dari intervensi tunggal menjadi bagian dari proses peningkatan kapabilitas. (Utomo et al., 2021; Afdawaiza et al., 2025)

Sertifikasi Halal sebagai Strategic Capability

Sertifikasi halal perlu diposisikan sebagai strategic capability, bukan sekadar persyaratan administratif. Manfaat sertifikasi akan lebih besar apabila dihubungkan dengan kualitas produk, kemasan, branding, distribusi, dan akses pembeli. Karena itu, program sertifikasi dalam TSEL harus berjalan bersama upgrading dan market linkage. (Azizah et al., 2025; Kristanto & Kurniawati, 2025)

Integrasi Halal Value Chain

TSEL memandang rantai nilai halal sebagai hubungan Supplier kepada aktivitas Produksi melalui pendekatan Halal Assurance, Packaging Logistics kepada Retail/Marketplace hingga sampai ditangan Industri dan Consumer. Integrasi ini memungkinkan UMKM memperoleh posisi yang lebih kuat dalam penciptaan nilai dan mengurangi fragmentasi intervensi. (Ardiantono et al., 2024; Harsanto et al., 2025)

Digitalization sebagai Value Enabler

Digitalisasi digunakan untuk memperkuat hubungan antaraktor melalui marketplace, digital payment, pencatatan transaksi, customer management, dan traceability. Teknologi harus dipilih berdasarkan manfaat ekonomi dan kesiapan UMKM sehingga prinsip value first lebih diutamakan daripada technology first. (Harsanto et al., 2024; Qizam et al., 2025)

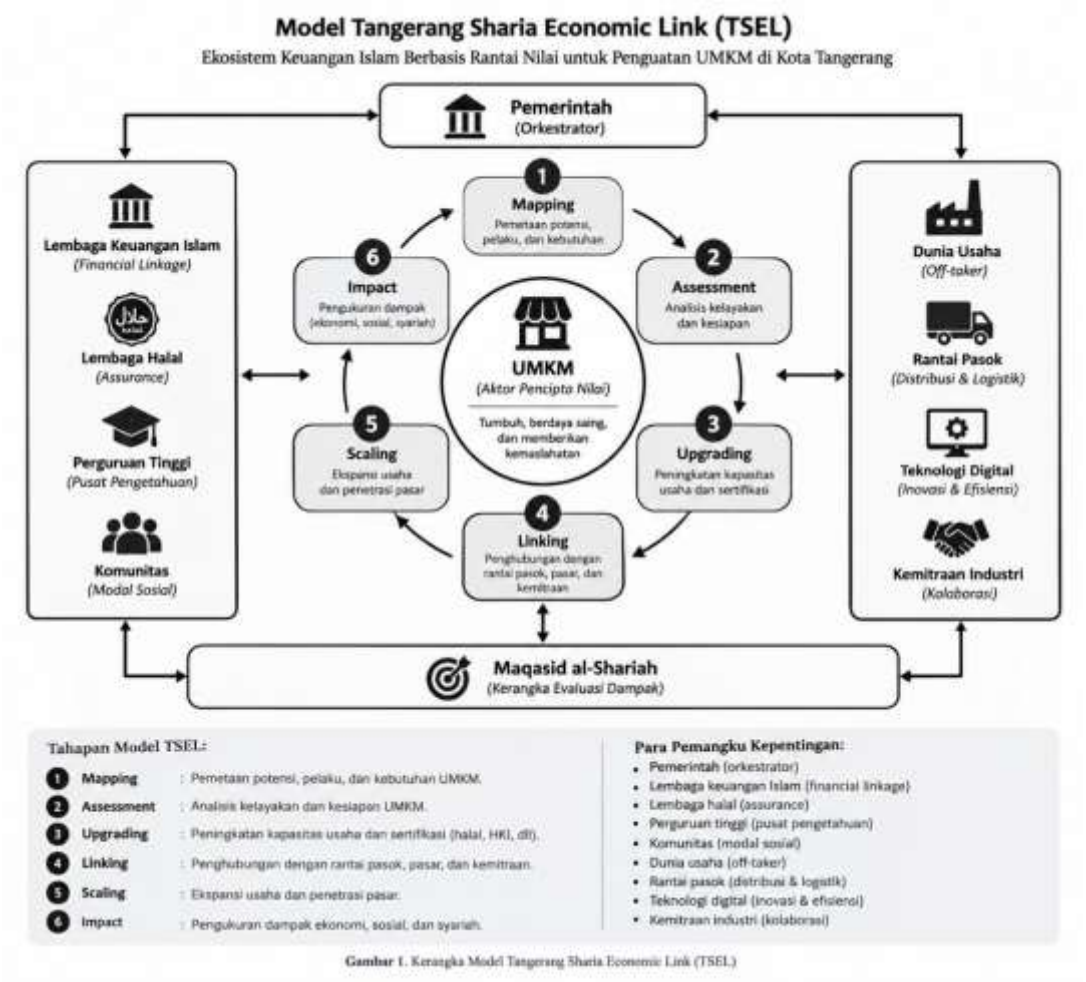
Multipihak sebagai Institutional Architecture

Pemerintah berfungsi sebagai orchestrator; lembaga keuangan Islam sebagai penyedia financial linkage; UMKM sebagai aktor utama penciptaan nilai; lembaga halal sebagai assurance provider; industri sebagai off-taker; marketplace sebagai penghubung pasar; perguruan tinggi sebagai knowledge intermediary; dan komunitas sebagai penguat social capital. Pembagian fungsi ini menjadikan kolaborasi sebagai functional ecosystem (Utomo et al., 2021; Afdawaiza et al., 2025b). Modal sosial, kepercayaan, dan kapabilitas keuangan juga dapat memperkuat dinamika ekosistem usaha halal (Afdawaiza et al., 2025a).

Copyright © 2026: Wahyu Hidayat, & Muhammad Azka

Model Tangerang Sharia Economic Link (TSEL)

Untuk memberikan Gambaran umum terkait konsep Model Tangerang Sharia Economic Link, berikut ini peneliti tampilkan:



Gambar 1. Kerangka Model Tangerang Sharia Economic Link (TSEL)

Evaluasi TSEL tidak berhenti pada omzet, jumlah pembiayaan, sertifikasi, atau jumlah UMKM yang masuk marketplace. Evaluasi juga mencakup kepatuhan syariah, kesejahteraan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, ketahanan ekonomi keluarga, perlindungan aset, serta kontribusi sosial dan lingkungan. Kerangka ini menggabungkan orientasi Maqasid al-Shariah dengan pembacaan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Qizam et al., 2025; Elkington, 1997).

Model TSEL terdiri atas enam tahapan: (1) Mapping, yaitu pemetaan sektor, kapasitas, legalitas, halal, pembiayaan, teknologi, dan kebutuhan pasar; (2) Assessment, yaitu klasifikasi kesiapan dan kebutuhan; (3) Upgrading, berupa peningkatan manajemen, pembiayaan, halal, digitalisasi, kemasan, kualitas, dan pemasaran; (4) Linking, yaitu penghubungan dengan lembaga keuangan, marketplace, retail, hotel, restoran, industri, dan perusahaan jasa; (5) Scaling, yaitu peningkatan skala bagi UMKM yang telah memenuhi standar; dan (6) Impact, yaitu evaluasi ekonomi dan kemaslahatan.

Secara konseptual, alur TSEL membentuk siklus: Mapping, Assessment, Upgrading, Linking, Scaling, Impact, dan Feedback. Feedback dari tahap impact digunakan untuk memperbaiki pemetaan dan assessment berikutnya sehingga model beroperasi sebagai continuous improvement ecosystem.

Evaluasi melalui Maqasid al-Shariah

Evaluasi TSEL tidak berhenti pada omzet, jumlah pembiayaan, sertifikasi, atau jumlah UMKM yang masuk marketplace. Evaluasi juga mencakup kepatuhan syariah, kesejahteraan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, ketahanan ekonomi keluarga, serta perlindungan aset. Dengan demikian, tujuan bisnis dan tujuan sosial berada dalam satu kerangka evaluasi.

Implikasi Kebijakan

Pemerintah Kota Tangerang dapat mengembangkan Sharia UMKM Hub sebagai pusat integrasi data, assessment, pendampingan, pembiayaan, sertifikasi halal, digitalisasi, dan akses pasar. Database UMKM perlu dikembangkan menjadi value-chain readiness database. Pembiayaan syariah perlu dikaitkan dengan pendampingan, sementara sertifikasi halal perlu dihubungkan dengan strategi pemasaran dan akses pembeli. Kemitraan dengan industri, hotel, restoran, retail, dan perusahaan logistik juga perlu diarahkan untuk menciptakan market linkage yang nyata.

KESIMPULAN

Penguatan UMKM di Kota Tangerang membutuhkan pergeseran dari pendekatan intervensi parsial menuju ekosistem berbasis rantai nilai. Pembiayaan Islam, peningkatan kapasitas, sertifikasi halal, digitalisasi, akses pasar, dan dukungan kelembagaan perlu dihubungkan karena masing-masing komponen berkontribusi pada proses penciptaan nilai.

Penelitian ini mengembangkan Tangerang Sharia Economic Link (TSEL) melalui enam tahap: mapping, assessment, upgrading, linking, scaling, dan impact. Model menempatkan UMKM sebagai aktor pencipta nilai, lembaga keuangan Islam sebagai financial linkage, pemerintah sebagai orkestrator, lembaga halal sebagai assurance provider, dunia usaha sebagai mitra rantai nilai, perguruan tinggi sebagai knowledge intermediary, dan komunitas sebagai penguat modal sosial. Kontribusi utama model terletak pada integrasi Islamic financial ecosystem dengan halal value chain, digitalisasi, market linkage, dan evaluasi Maqasid al-Shariah dalam konteks lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Afdawaiza, A., Supriani, I., & Yusfiarto, R. (2025). Catalyzing Muslim women-owned halal SMEs: Aligning models of Islamic financial institutions and governmental involvement. Social Sciences & Humanities Open, 12, 102042.

Afdawaiza, A., Yusfiarto, R., Pambekti, G. T., Al Ghunaimi, H., & Febriyanto, A. (2025). From social trust to halal industry dynamic: The synergy of Islamic social capital and financial capability in small enterprises sectors. Mazahib, 24(2), 248–281.

Ardiantono, D. S., Ardyansyah, G. D., Sugihartanto, M. F., Al Mustofa, M. U., & Lisdiantini, N. (2024). Mapping the barrier and strategic solutions of halal supply chain implementation in small and medium enterprises. Journal of Islamic Marketing, 15(7), 1673–1705.

Arianty, E., Marsono, M., Indrawati, I., & Risnandar, R. (2025). Empowering Sharia-based MSMEs and financial institutions to enhance the halal industry ecosystem. Journal of Islamic Economics Lariba, 11(1), 297–332.

Armina, S. H., & Setiawan, M. A. (2026). Islamic financial ecosystem integration and halal value chain performance of certified MSMEs in Indonesia. Proceeding of Annual International Conference on Islamic Economics, 5(1).

Azizah, S. N., Koeswinarno, K., Salam, A. N., Ansyah, R. H. A., Kustini, K., Atieqoh, S., & M., F. (2025). Linking halal certificate and micro, small and medium enterprises (MSMEs) performance in Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 18(6), 1271–1290.

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang. (2026). Kota Tangerang dalam angka 2026. BPS Kota Tangerang.

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.

Efendi, R., Natalina, S. A. N., Maghfiroh, F. M., & Asmoro, W. K. (2025). Halal ecosystem micro small and medium enterprises through the integration of value chain and green strategies. Istithmar, 8(2), 89–101.

Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. Capstone.

Fianto, B. A., Fauzi, F. P., Suprayogi, N., Filianti, D., Gan, C., & Anisha, A. I. I. N. (2026). Factors influencing behavior intention to obtain halal certificate: Study on MSMEs in Indonesia and Malaysia. Journal of Islamic Marketing, 17(1), 160–190.

Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Pitman.

Harsanto, B., Farras, J. I., Firmansyah, E. A., Pradana, M., & Apriliadi, A. (2024). Digital technology 4.0 on halal supply chain: A systematic review. Logistics, 8(1), 21.

Harsanto, B., Pradana, M., Yunani, A., Firmansyah, E. A., Apriliadi, A., Farras, J. I., & Nabila, F. S. (2025). Halal value chain: A structured literature review and meta-analysis. Journal of Islamic Marketing, 16(4), 1095–1117. https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0387

Isra, N. S., & Malahayatie. (2026). Digital Islamic finance, halal value chains, and financial inclusion among halal MSMEs in Aceh. Journal of Islamic Economic and Business Research, 6(1). https://doi.org/10.18196/jiebr.v6i1.609

Kristanto, D., & Kurniawati, D. A. (2025). Financial performance of Indonesian frozen food MSMEs: Halal supply chain resilience, certification and competitive advantage. Journal of Islamic Marketing, 16(10), 3092–3114.

Latifah, L., & Ngalimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *SINTESA: Jurnal Sains & Teknologi*, *1*(02), 51-64.

Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(2), 426-439.

Menne, F., Surya, B., Yusuf, M., Suriani, S., Ruslan, M., & Iskandar, I. (2022). Optimizing the financial performance of SMEs based on sharia economy: Perspective of economic business sustainability and open innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(1), 18.

Ngalimun, M. M. (2018). Komunikasi Interpersonal Ngalimun. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265-278.

Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2025). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Otoritas Jasa Keuangan.

Pemerintah Kota Tangerang. (2025, 18 Desember). Pemkot Tangerang fasilitasi 545 UMKM: Sertifikasi halal, HKI dan barcode gratis sepanjang 2025. https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/59772/pemkot-tangerang-fasilitasi-545-umkm-sertifikasi-halal-hki-dan-barcode-gratis-sepanjang-2025

Pemerintah Kota Tangerang. (2026, 29 Agustus). Pemkot Tangerang perkuat ekosistem UMKM lewat kepemilikan NIB. https://banten.antaranews.com/amp/berita/389435/pemkot-tangerang-perkuat-ekosistem-umkm-lewat-kepemilikan-nib

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. Free Press.

Qizam, I., Berakon, I., & Ali, H. (2025). The role of halal value chain, Sharia financial inclusion, and digital economy in socio-economic transformation: A study of Islamic boarding schools in Indonesia. Journal of Islamic Marketing, 16(3), 810–840.

Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28(13), 1319–1350.

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509–533.

Utomo, S. B., Sekaryuni, R., Widarjono, A., Tohirin, A., & Sudarsono, H. (2021). Promoting Islamic financial ecosystem to improve halal industry performance in Indonesia: A demand and supply analysis. Journal of Islamic Marketing, 12(5), 992–1012.